

RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menjadi dasar penyusunan APBN adalah RKP. Sedangkan dasar penyusunan APBD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun atas dasar Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun suatu Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan tahun anggaran 2021. Dengan disusunnya Renja 2023 tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan telah tersusunnya Renja 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengemban tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Blitar, Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710818 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN II	6
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	8
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	20
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka DPMPTSP Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Renja PD tahun 2023. Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan DPMPTSP yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja PD tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Blitar akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2023.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja PD Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2039;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja PD Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan RKA PD. Sedangkan Tujuan penyusunan Renja PD DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Renja PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Renja PD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan penanaman modal melalui 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.688.010.190 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.293.984.143 (91,60%).

Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sasaran ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Sasaran ***Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021, dapat kami uraikan analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Blitar tahun 2023 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Adapun capaian Indikator Sasaran Strategis pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 83 terealisasi 83,71 dengan tingkat capaian 100,86% (mlebihi target); sedangkan IKM Pelayanan Perizinan pada tahun 2020 dengan target 82 terealisasi 80,30 dengan tingkat capaian 97,93%. Dapat kita lihat realisasi kinerja dan capaian kinerja pada indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun lalu.
2. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2021 dengan target 19% terealisasi -8,86% dengan tingkat capaian -46,63%; Sedangkan di tahun 2020 dengan target 18% terealisasi -32,47% dengan capaian -180,39%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pada indikator persentase peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Data Realisasi Investasi Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	PMDN	PMA	TOTAL
2017	Rp. 1.250.367.718.562,-	-	Rp. 1.250.367.718.562,-
2018	Rp 1.216.140.105.721,-	Rp. 236.616.921.052,-	Rp. 1.452.757.026.773,-
2019	Rp. 3.197.219.696.256,-	Rp. 1.469.129.210.455,-	Rp. 4.666.348.906.711,-
2020	Rp. 404.736.452.162,-	Rp. 997.869.330.109,-	Rp. 1.402.605.782.271,-
2021	Rp. 1.075.324.540.178,-	Rp. 202.972.218.243,-	Rp. 1.278.296.758.421,-

Menggunakan Formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Investasi 2021} - \text{Realisasi Investasi 2020}}{\text{Realisasi Investasi 2020}} \times 100\% = \frac{1.278.296.758.421 - 1.402.605.782.271}{1.402.605.782.271} \times 100\% = -8,86\%$$

Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET 2021	REALISASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,50 dan A	76,14 dan BB	70,34 dan BB
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	93	83	83,71
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	19%	-8,86%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah tercapai tingkat kemajuan rata-rata tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target pada awal target Renstra untuk IKM dan Nilai SAKIP adalah baik meskipun untuk realisasi Nilai SAKIP belum sesuai target tetapi predikat tetap sangat baik sedangkan Realisasi Investasi kurang baik.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, beberapa hal yang akan di evaluasi adalah :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Target realisasi kinerja harusnya 0,02% pelaku usaha mendapat fasilitas/insentif penanaman modal, namun belum dapat dilaksanakan karena refocussing anggaran sehingga belum disusunnya regulasi penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - 2) Program Pelayanan Penanaman Modal. Target realisasi kinerja harusnya 5% peningkatan jumlah izin yang diterbitkan, namun tahun belum dapat mencapai target karena adanya covid 19 dan transisi perundang-undangan penanaman modal, PPKM yang diberlakukan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan pembatasan kegiatan pelayanan perizinan sehingga pemohon yang datang ke DPMPTSP berkurang drastis, serta kegiatan JOSS BANGGET (Jemput layanan OSS ke wilayah) tidak

dilaksanakan. Selain itu, perubahan dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA pada awal Agustus 2021 juga mempengaruhi pelayanan perizinan dikarenakan sistem yang belum stabil masih sering dilakukan pengembangan sehingga sering terjadi kendala.

2. Realisasi program yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu hampir keseluruhan target kinerja tercapai sesuai target yang direncanakan.
3. Realisasi program yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu tidak ada capaian kinerja program yang melebihi target yang direncanakan.
4. Faktor tidak tercapainya kinerja program yaitu :
 - 1) Adanya covid 19 dan diberlakukan PPKM;
 - 2) Adanya refocussing anggaran untuk pendanaan penanganan covid-19;
 - 3) Adanya transisi perundang-undangan penanaman modal.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti penyusunan regulasi penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
6. Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya kinerja program adalah :
 - 1) Segera menyusun Perda berdasarkan PP No 5 Th 2021;
 - 2) Melaksanakan pelayanan secara daring/online;
 - 3) Melaksanakan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2021, sebagaimana tabel E-81 berikut :

Tabel E-81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

lembar 10 dari 50

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	-																										
2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Persentase peningkatan penanaman modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	- 0.02	74.047.750,00	-	0,00	- 0.02	74.047.750,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	73.169.489,00	-	73.169.489,00	- 0.00	98,81	-	73.169.489,00	- 0.00	0,00	98,81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	- 2	74.047.750,00	-	0,00	- 2	74.047.750,00	-	0,00	- 0.1	0,00	- 0.5	0,00	- 1	73.169.489,00	- 1	73.169.489,00	- 50.00	98,81	- 1.00	73.169.489,00	- 50.00	50,00	98,81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen/regulasi perencanaan penanaman modal yang disusun	- 1	0,00	-	0,00	- 1	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 0.00		- 0.00	0,00	- 0.00	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	- jumlah dokumen potensi dan peluang investasi	- 1	74.047.750,00	-	0,00	- 1	74.047.750,00	-	0,00	- 0.1	0,00	- 0.5	0,00	- 1	73.169.489,00	- 1	73.169.489,00	- 100.00	98,81	- 1.00	73.169.489,00	- 100.00	100,00	98,81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah																										
7		Program Promosi Penanaman Modal	- peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	- 2	285.623.000,00	-	0,00	- 2	285.623.000,00	- 1	0,00	- 2	0,00	- 2	0,00	- 2	267.905.300,00	- 2	267.905.300,00	- 100.00	93,80	- 2.00	267.905.300,00	- 100.00	100,00	93,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- peningkatan kegiatan promosi investasi	- 1	285.623.000,00	-	0,00	- 1	285.623.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 1	267.905.300,00	- 1	267.905.300,00	- 100.00	93,80	- 1.00	267.905.300,00	- 100.00	100,00	93,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki		Kr	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100			16		
9		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	- jumlah jenis strategi promosi yang dilaksanakan - jumlah market survey terkait peluang investasi - jumlah rapat koordinasi	- 2 - 10 - 10	21.176.000,00	- - -	0,00	- 2 - 10 - 10	21.176.000,00	- 2 - 2 - 1		0,00	- 2 - 3 - 2	0,00	- - -	10.651.000,00	- 2 - 3 - 2	10.651.000,00	- 50,00	50,30	- 2,00 - 3,00 - 2,00	10.651.000,00	100,00 50,00 50,30	- -30,00 -20,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
10		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	- 6	264.447.000,00	- 7	0,00	- 6	264.447.000,00	- 1	0,00	- 1	0,00	-	0,00	-	257.254.300,00	- 2	257.254.300,00	-	150,00	97,28	- 9	257.254.300,00	-	150,00	150,00	97,28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	-																												
12		Program Pelayanan Penanaman Modal	- Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	- 5	99.680.300,00	-	0,00	- 5	99.680.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	97.716.900,00	-	97.716.900,00	-	98,03	-30,38	97.716.900,00	-	-607,60	98,03	-607,60	98,03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	- 5	99.680.300,00	-	0,00	- 5	99.680.300,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	97.716.900,00	-	97.716.900,00	-	98,03	-31,61	97.716.900,00	-	-632,20	98,03	-632,20	98,03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- jumlah pemohon yang terlayani dengan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara online/offline - Jumlah pelayanan perizinan di wilayah kecamatan Kab. Blitar	7500 - 68	38.547.650,00	- 14231 -	0,00	- 7500 - 68	38.547.650,00	- 3341 -	0,00	- 7361 - 18	0,00	- 8347 - 27	0,00	- 9732 - 37	38.320.900,00	- 9732 - 37	38.320.900,00	- 92,08	99,41	- 9732 - 37	38.320.900,00	-	129,76 - 54,41	92,08	99,41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
15		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	- jumlah pemohon yang memenuhi komitmen perizinan - Jumlah movev pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	- 50 - 50	13.144.500,00	- 478 -	0,00	- 50 - 50	13.144.500,00	- 33 -	0,00	- 86 - 8	0,00	- 111 -	0,00	- 156 - 11	12.049.500,00	- 156 - 11	12.049.500,00	-	167,00	- 156 - 11	12.049.500,00	-	312,00 - 22,00	167,00	91,67	91,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	- jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan yg terlayani - jumlah dokumen SKM pelayanan perizinan - jumlah sosialisasi regulasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	- 2 - 2 - 12	47.988.150,00	- 2 - 1 -	0,00	- 2 - 2 - 12	47.988.150,00	- - -	0,00	- 1 - -	0,00	- 1 - - 13	0,00	- 2 - 1 - 13	47.346.500,00	- 2 - 1 - 13	47.346.500,00	- 86,11	98,66	- 2,00 - 1,00 - 13,00	47.346.500,00	-	100,00 - 50,00 -	108,33	86,11	98,66	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki		Kr	Rp
17		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	- 10600	408.925.240,00	- 8700	0,00	- 10600	409.456.740,00	- 9117	0,00	- 9271	46.115.540,00	- 9644	0,00	-	202.102.182,00	- 9644	248.217.722,00	- 86,53	60,70	- 9172,00	248.217.722,00	- 86,53	86,53	60,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	- 1600	408.925.240,00	-	0,00	- 1600	409.456.740,00	- 90	0,00	- 154	46.115.540,00	- 199	0,00	-	202.102.182,00	- 443	248.217.722,00	- 27,69	60,70	- 443	248.217.722,00	- 27,69	27,69	60,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan pelaksanaan penanaman modal - Jumlah pemantauan pelaksanaan penanaman modal - jumlah verifikasi dan evaluasi LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) - jumlah fasilitasi permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya	- 2 - 100 - 100 - 25	57.647.840,00	- - - -	0,00 0,00 0,00 -	- 2 - 100 - 100 - 25	57.647.840,00	- - - -	0,00 0,00 0,00 -	- 0,65 - 20 - 12 - 4	- 1 4.310.040,00 - 80 - 48 - 11	- 0,00 0,00 -	- 2 - 116 - 60 - 15	-	19.684.000,00	- 116 - 60 - 15	23.994.040,00	- 84,00	41,62	- 2 - 116 - 60 - 15	23.994.040,00	- 100,00 - 116,00 - 60,00	84,00	41,62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah peserta sosialisasi / bimtek OSS dan LKPM - Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM - jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal dan kemitraan usaha skala besar dengan UMKM yang dilaksanakan	- 240 - 2 - 8	250.267.300,00	- - -	0,00 0,00 -	- 240 - 2 - 8	250.267.300,00	- - -	0,00 0,00 -	- 44 - - 2	- 56 38.115.500,00 - -	0,00 0,00 -	- 248 - 1 - 8	-	124.075.900,00	- 248 - 1 - 8	162.191.400,00	- 84,44	64,81	- 248 - 1 - 8	162.191.400,00	- 103,33 - 50,00 100,00	84,44	64,81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah laporan hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal - jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	- 2 - 100	101.010.100,00	- -	0,00 -	- 2 - 100	101.541.600,00	- -	0,00 -	- 0,2 - 18	- 1 3.690.000,00 - 66	0,00 0,00 -	- 2 - 168	-	58.342.282,00	- 2 - 168	62.032.282,00	- 134,00	61,41	- 2 - 168	62.032.282,00	- 100,00 - 168,00	134,00	61,41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah																										
23		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- persentase data yang tersedia tepat waktu	- 100	23.581.750,00	-	0,00	- 100	23.581.750,00	-	0,00	-	3.912.800,00	- 1	0,00	- 2	19.134.500,00	- 2	23.047.300,00	- 2,00	97,73	- 2	23.047.300,00	- 2,00	2,00	97,73	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki	Kr	Rp			
24		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	- jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	- 2	23.581.750,00	-	0,00	- 2	23.581.750,00	-	0,00	-	3.912.800,00	- 1	0,00	- 2	19.134.500,00	- 2	23.047.300,00	-	100,00	97,73	- 2,00	23.047.300,00	-	100,00	100,00	97,73	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- jumlah proyek yang dilaporkan melalui LKPM dan IUMK - jumlah aplikasi pendamping pengolahan data yang dikembangkan	-	23.581.750,00	-	0,00	-	23.581.750,00	- 1887	0,00	- 4349	3.912.800,00	- 6187	0,00	-	19.134.500,00	- 6187	23.047.300,00	-	68,75	97,73	- 6187	23.047.300,00	-	137,49	68,75	97,73	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26	-																												
27		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 100	3.796.152.150,00	-	5.000.000,00	- 100	3.796.152.150,00	-	702.051.630,00	-	423.227.818,00	-	96.447.690,00	- 100	2.362.284.803,00	- 100	3.584.011.941,00	-	100,00	94,54	- 100	3.589.011.941,00	-	100,00	100,00	94,54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
28		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	- 12	173.777.600,00	-	0,00	- 12	173.777.600,00	- 3	0,00	- 6	32.015.491,00	- 9	0,00	- 12	140.599.809,00	- 12	172.615.300,00	-	100,00	99,33	- 12,00	172.615.300,00	-	100,00	100,00	99,33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- 40	50.695.500,00	-	0,00	- 40	50.695.500,00	- 40	0,00	- 40	0,00	- 40	0,00	- 40	49.824.800,00	- 40	49.824.800,00	-	100,00	98,28	- 40,00	49.824.800,00	-	100,00	100,00	98,28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
30		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	- 15	8.508.000,00	-	0,00	- 15	8.508.000,00	- 15	0,00	- 15	0,00	- 15	0,00	- 15	8.402.500,00	- 15	8.402.500,00	-	100,00	98,76	- 15,00	8.402.500,00	-	100,00	100,00	98,76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
31		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	- 4	9.880.000,00	-	0,00	- 4	9.880.000,00	- 4	0,00	- 4	1.952.000,00	- 4	0,00	- 4	7.770.000,00	- 4	9.722.000,00	-	100,00	98,40	- 4,00	9.722.000,00	-	100,00	100,00	98,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
32		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	- 6	27.164.200,00	-	0,00	- 6	27.164.200,00	- 6	0,00	- 6	5.800.000,00	- 6	0,00	- 6	21.345.000,00	- 6	27.145.000,00	-	100,00	99,93	- 6,00	27.145.000,00	-	100,00	100,00	99,93	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
33		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	- 360	1.500.000,00	-	0,00	- 360	1.500.000,00	- 90	0,00	- 180	625.000,00	- 240	0,00	- 360	875.000,00	- 360	1.500.000,00	-	100,00	100,00	- 360,00	1.500.000,00	-	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
34		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah mamin yang disediakan	- 75 - 4	72.065.000,00	- -	0,00	- 75 - 4	72.065.000,00	- -	0,00	- 7 - 4	23.638.491,00	- 18 - 4	0,00	- 25 - 4	48.426.509,00	- 25 - 4	72.065.000,00	- 66,66 100,00	- 25 - 4,00	72.065.000,00	- 33,33 -	66,66 100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
35		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	- 5	3.964.900,00	-	0,00	- 5	3.964.900,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 5	3.956.000,00	- 5	3.956.000,00	- 100,00	99,78	- 5,00	3.956.000,00	- 100,00	100,00	99,78	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
36		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	- 2	72.568.000,00	-	0,00	- 2	72.568.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	- 11	71.390.000,00	- 11	71.390.000,00	- 550,00	98,38	- 11,00	71.390.000,00	- 550,00	550,00	98,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 12	2.500.000,00	-	0,00	- 12	2.500.000,00	- 12	0,00	- 12	200.000,00	- 12	0,00	- 12	1.768.500,00	- 12	1.968.500,00	- 100,00	78,74	- 12,00	1.968.500,00	- 100,00	100,00	78,74	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
38		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12	70.289.150,00	-	0,00	- 12	70.289.150,00	- 3	0,00	- 6	32.341.711,00	- 9	0,00	- 12	29.615.254,00	- 12	61.956.965,00	- 100,00	88,15	- 12,00	61.956.965,00	- 100,00	100,00	88,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
39		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	- 11	250.800.000,00	-	0,00	- 11	250.800.000,00	- 3	45.600.000,00	- 6	68.400.000,00	- 9	68.400.000,00	- 11	68.400.000,00	- 11	250.800.000,00	- 100,00	100,00	- 11,00	250.800.000,00	- 100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
40		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- 12	72.210.000,00	-	0,00	- 12	72.210.000,00	- 3	0,00	- 6	26.478.300,00	- 9	0,00	- 12	45.730.266,00	- 12	72.208.566,00	- 100,00	100,00	- 12,00	72.208.566,00	- 100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
41		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	- 80	28.990.000,00	-	0,00	- 80	28.990.000,00	- 80	0,00	- 80	6.000.000,00	- 80	0,00	- 80	22.965.000,00	- 80	28.965.000,00	- 100,00	99,91	- 80,00	28.965.000,00	- 100,00	100,00	99,91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
42		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	- 2	28.300.000,00	-	0,00	- 2	28.300.000,00	-	0,00	-	0,00	- 2	28.047.690,00	- 2	0,00	- 2	28.047.690,00	- 100,00	99,11	- 2,00	28.047.690,00	- 100,00	100,00	99,11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 * 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
43		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	- 30	3.046.354.000,00	-	0,00	- 30	3.046.354.000,00	- 27	656.451.630,00	- 25	257.792.316,00	- 25	0,00	- 25	1.931.452.574,00	- 25	2.845.696.520,00	- 83,33	93,41	- 25,00	2.845.696.520,00	- 83,33	83,33	93,41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
44		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	- 10	8.533.400,00	- 6	5.000.000,00	- 10	8.533.400,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 10	8.533.400,00	- 10	8.533.400,00	- 80,00	158,59	- 8,00	13.533.400,00	- 80,00	80,00	158,59	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
45		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- 6	0,00	-	0,00	- 6	0,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 5	0,00	- 6	0,00	- 6	0,00	-	100,00	- 6,00	0,00	-	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
46		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- 12	41.830.000,00	-	0,00	- 12	41.830.000,00	- 3	0,00	- 6	0,00	- 9	0,00	- 12	41.830.000,00	- 12	41.830.000,00	-	100,00	- 12,00	41.830.000,00	-	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rata-rata Capaian Kinerja Program																					-53,18%		90,60%				
Predikat Kinerja Program																					Sangat Rendah		Tinggi				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					110,22%		86,66%				
Predikat Kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi		Tinggi				
<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>--</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 03. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>- Sudah dilakukan promosi sektor usaha yaitu sektor usaha kopi dan cokelat</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 04. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>--</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>- Investasi Tahun 2017 sd 2020 : 8.772.079.434.317, Investasi 2021 TW 1 : 345.169.906.682, sd. TW 2 : 499.778.952.223, sd. TW 3 : 872.301.786.181</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>--</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>--</p> <p>Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>- adanya transisi perundang-undangan penanaman modal</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 03. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>--</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 04. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>- pandemi covid 19</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>- pada aplikasi LKPM data yang keluar masih sampai dengan TW III, untuk TW IV belum keluar</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>--</p> <p>2-18.0-0.0-0.01.00. 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>--</p>																											

No.	Sasaran	Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Indikator Kinerja Program (Output) / Sub-Regulasi (Output)	Target Kinerja Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akar Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun 2022 yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya (0 yang direvisasi (2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Pada Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2021		Target Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13/12/19%	14-12	15-15/100	16	17	18			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16

Tugas Laju yang diberikan dalam thutan meliputi:
 3-18.04.04.01.00. 02. Program Pengembangan S&M Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 03. Program Prosesi Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 06. Program Pengalihan Data dan Sistem Informasi Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 01. Program Persejangan Unsur Perikanan Daerah Kabupaten/Kota
 ..

Tugas Laju yang diberikan dalam RPOD meliputi:
 3-18.04.04.01.00. 02. Program Pengembangan S&M Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 03. Program Prosesi Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 05. Program Pengendalian Pelaksanaan Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 06. Program Pengalihan Data dan Sistem Informasi Perikanan Modal
 ..
 3-18.04.04.01.00. 01. Program Persejangan Unsur Perikanan Daerah Kabupaten/Kota
 ..

Disusun
 Blitar, Agustus 2022

KERALA DPMPTSP
 KABUPATEN BLITAR *fd*

AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710818 199101 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terdapat indikator kinerja kunci atau IKK sesuai Peraturan Kemendagri No 18 Tahun 2020. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan urusan penanaman modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Analisis pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal		Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	8700M	9700 M	10700 M	11700 M	8700 M	10050 M	10700 M	11700 M	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun lalu. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD.

DPMPTSP mendukung **Misi Bupati yang ketiga** yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dan **Misi Bupati yang keempat** yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Indikator Kinerja Utama yang ada di DPMPTSP sudah mendukung pencapaian Misi Bupati.

Dalam pemenuhan target Indikator Sasaran Strategis ada beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan target yang direncanakan tidak tercapai. Pada Tahun 2021 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pandemi COVID-19 transisi perundang-undangan penanaman modal sehingga terdapat perubahan pada sistem pelayanan perizinan yaitu semenjak berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- 2) Pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku usaha yang menon-aktifkan usahanya sementara sehingga mengakibatkan akumulasi realisasi investasi di tahun 2021 mengalami penurunan.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

- 1) Membuat strategi pelayanan terkait peningkatan kualitas pelayanan perizinan pada masa pandemi covid-19 diantaranya:
 - a. Segera menyusun Perda pelayanan perizinan menyesuaikan PP Nomor 5 Tahun 2021;
 - b. Terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi IT dalam memperlancar perizinan;
 - c. Terus melakukan koordinasi dan peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual atau online.
- 2) Membuat strategi pelayanan terkait peningkatan realisasi investasi pada masa pandemi covid-19 diantaranya:
 - a. Terus melaksanakan promosi investasi baik melalui website atau webinar secara online;
 - b. Menciptakan iklim usaha yang baik;
 - c. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis, monev penanaman modal dan memfasilitasi permasalahan pelaku usaha di masa pandemi covid-19.

Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Peningkatan Efektifitas Promosi dan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal; dan
4. Arahan Wakil Presiden untuk Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2021- 2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA, BALDATUN, TOYYIBAN, WAROBBUN GHOFUR”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas;
4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan;

Dari 4 (empat) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah mengacu pada misi ketiga dan keempat.

Misi yang ke 3 (tiga), yaitu

“pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas” dan

Misi yang ke 4 (empat), yaitu

“percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan”.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Renstra SKPD, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas DPMPTSP Tahun 2022 mengajukan 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Review terhadap RKPD harus selalu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di DPMPTSP selaras dengan RKPD kabupaten Blitar. Tidak ada catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD karena Rancangan awal RKPD dengan Renja PD sudah sesuai. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel mengenai hasil evaluasi atas dokumen RKPD yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Blitar :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Blitar

SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

lembar 21 dari 50

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.130.191.259	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.130.191.259	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	15 dokumen	12.775.900	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	15 dokumen	12.775.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	7.775.000	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	7.775.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	5.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	3.108.097.800	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	3.108.097.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.059.167.800	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/bulan	3.059.167.800	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	48.930.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	48.930.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	156.910.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	156.910.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.954.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.954.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	55.135.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	55.135.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.731.300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.731.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	8.380.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	8.380.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	20.742.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	20.742.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 dokumen	1.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 dokumen	1.800.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	61.168.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	61.168.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis	104.464.100	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis	104.464.100	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	8 unit	95.483.100	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	8 unit	95.483.100	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	8.981.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah unit mebel yang disediakan	1 paket	8.981.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	398.215.959	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	398.215.959	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	2.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	83.472.870	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	83.472.870	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	2 laporan	312.743.089	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	2 laporan	312.743.089	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	349.727.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	349.727.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	72.210.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	72.210.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	64.278.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	64.278.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	213.239.600	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	213.239.600	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	304.284.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	304.284.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	100.240.631	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	100.240.631	
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	75.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	25.240.500	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	25.240.500	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 dokumen	204.043.500	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 dokumen	204.043.500	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian
	Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/kota	Kabupaten Blitar	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	2 dokumen	124.043.500	Sub Kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang investasi Kabupaten/kota	Kabupaten Blitar	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	2 dokumen	124.043.500	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian
	Program Promosi Penanaman Modal	Nasional	peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	454.844.000	Program Promosi Penanaman Modal	Nasional	peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	454.844.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nasional	peningkatan kegiatan promosi investasi	1 kali	454.844.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nasional	peningkatan kegiatan promosi investasi	1 kali	454.844.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Nasional	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kaupaten/Kota	1 dokumen	107.942.000	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Nasional	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kaupaten/Kota	1 dokumen	107.942.000	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	346.902.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	346.902.000	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	225.917.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	225.917.000	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	225.917.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	225.917.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	150.000.000	Prioritas Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis E-Government
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	48.189.500	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	48.189.500	Prioritas Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis E-Government

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kabupaten Blitar	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	27.727.500	Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kabupaten Blitar	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 orang	27.727.500	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	10.700 Milyar	430.636.500	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	10.700 Milyar	430.636.500	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Persentase Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	1600 perusahaan	430.636.500	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Persentase Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	1600 perusahaan	430.636.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 kegiatan usaha	9.345.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	6 kegiatan usaha	9.345.000	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 pelaku usaha	350.396.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	255 pelaku usaha	350.396.500	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	70.895.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	70.895.000	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	228.422.400	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	228.422.400	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	228.422.400	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	228.422.400	
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4 dokumen	228.422.400	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4 dokumen	228.422.400	Prioritas Pembangunan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pertanian

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar hanya menambahkan beberapa inovasi pada output kegiatan guna memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Kebijakan dan program prioritas nasional dimaksud dirujuk dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013

Berdasar hasil telaah dan sinkronisasi prioritas pembangunan RKPD 2023 terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai prioritas Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah dan Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan yang melekat sebagai penunjang pada program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar diantaranya :

- 1) Prioritas Pembangunan RKPD 2023 : ***Meningkatkan Realisasi Investasi pada Sektor Produktif dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan :***
 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
 2. Program Promosi Penanaman Modal
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2) Prioritas Pembangunan RKPD 2023 : **Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah** :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati, serta mencermati kondisi terkini dan isu-isu penting yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka untuk memadukan, mengarahkan, dan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1)	Meningkatkan Iklim Investasi di Kabupaten Blitar		ICOR	<i>Dilaksanakan oleh Diskominfo</i>	5,73
1.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<i>Hasil Evaluasi atas SAKIP dengan Nilai >70-80</i>	79,75 dan BB
2.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<i>Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	87
3.		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	<i>Jumlah Realisasi Investasi Tahun n dikurangi Tahun n-1 dibagi Tahun n-1 dikali 100</i>	20%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Program dan Kegiatan didasarkan pada kesesuaian sasaran RPJMD dan tujuan PD serta efisiensi atas dasar evaluasi program/kegiatan yang berjalan pada Renja awal. Dalam Misi III RPJMD menitikberatkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudian dalam Misi IV RPJMD menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi daerah yang selanjutnya kedua misi tersebut ditunjang oleh tujuan PD yaitu Meningkatkan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 5.774.295.159,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian DAU/APBD Murni sebesar Rp. 5.380.901.159,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 393.394.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Blitar.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci dijelaskan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD
Tahun 2023 Kabupaten Blitar Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

lembar 40 dari 50

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				5.774.295.159	APBD			7.664.804.631
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	100%	4.130.191.259	APBD		100%	5.035.314.971
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	DPMPTSP	15 dokumen	12.775.000	APBD		15 dokumen	16.896.128
2.18.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	10 dokumen	7.775.000	APBD		10 dokumen	10.283.628
2.18.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	5 dokumen	5.000.000	APBD		5 dokumen	6.612.500

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	DPMPTSP	2 laporan	3.108.097.800	APBD		2 laporan	4.071.629.200
2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	30 orang/bulan	3.059.167.800	APBD		30 orang/bulan	4.022.194.150
2.18.01.2.02.03	Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	12 dokumen	48.930.000	APBD		12 dokumen	49.435.050
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	DPMPTSP	12 bulan	156.910.800	APBD		12 bulan	208.268.605
2.18.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	1 paket	3.954.500	APBD		1 paket	5.243.580
2.18.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	55.135.000	APBD		1 paket	51.360.610
2.18.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMPTSP	1 paket	5.731.300	APBD		1 paket	7.935.000

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPMPTSP	1 paket	8.380.000	APBD		1 paket	13.066.300
2.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	1 paket	20.742.000	APBD		1 paket	29.756.250
2.18.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DPMPTSP	360 dokumen	1.800.000	APBD		360 dokumen	2.380.500
2.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	25 laporan	61.168.000	APBD		25 laporan	98.526.365
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	4 jenis	104.464.100	APBD		4 jenis	95.334.313
2.18.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Yang Diadakan	DPMPTSP	8 unit	95.483.100	APBD		4 unit	85.334.313
2.18.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	DPMPTSP	4 unit	8.981.000	APBD		4 unit	10.000.000
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	12 bulan	398.215.959	APBD		12 bulan	457.948.353
2.18.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat	DPMPTSP	2 laporan	2.000.0000	APBD		2 laporan	2.645.000

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Menyurat	Menyurat							
2.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	2 laporan	83.472.870	APBD		2 laporan	105.800.000
2.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	DPMPTSP	2 laporan	312.743.089	APBD		2 laporan	331.683.000
2.18.01.2.09.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	12 bulan	349.727.600	APBD		12 bulan	203.058.725
2.18.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	5 unit	72.210.000	APBD		5 unit	139.933.725
2.18.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	80 unit	64.278.000	APBD		80 unit	36.675.000
2.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPTSP	2 unit	213.239.600	APBD		2 unit	26.450.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim	Persentase peningkatan penanam modal yang	Kabupaten Blitar	0,02%	304.284.000	APBD		0,02%	410.293.235

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Penanaman Modal	mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal							
2.18.02.2.01.02	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kabupaten Blitar	2 investor	100.240.500	APBD		2 investor	132.568.235
2.18.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	99.187.500
2.18.02.2.01.02	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kabupaten Blitar	2 kegiatan usaha	25.240.500	APBD		2 kegiatan usaha	33.380.735
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	Kabupaten Blitar	2 dokumen	204.043.500	APBD		2 dokumen	277.725.000
2.18.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	1 dokumen	80.000.000	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Meningkatkan realisasi investasi pada	1 dokumen	105.800.000

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
							sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan)		
2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	2 dokumen	124.043.500	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan)	2 dokumen	171.925.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	Nasional	2 sektor usaha	454.844.000	APBD		2 sektor usaha	694.632.068
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kegiatan promosi investasi	Nasional	1 kali	454.844.000	APBD		1 kali	694.632.068
2.18.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Nasional	1 dokumen	107.942.000	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Meningkatkan realisasi investasi pada	1 dokumen	165.632.068

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
							sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan)		
2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Nasional	2 dokumen	346.902.000	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan)	2 dokumen	529.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	Kabupaten Blitar	5%	225.917.000	APBD		5%	526.608.575
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	Kabupaten Blitar	5%	225.917.000	APBD		5%	526.608.575

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.18.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Blitar	10.000 pelaku usaha	150.000.000	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD dan peningkatan pendapatan daerah)	10.000 pelaku usaha	198.375.000
2.18.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	50 kegiatan usaha	48.189.500	APBD		50 kegiatan usaha	63.733.575
2.18.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Blitar	5 orang	27.727.500	APBD		5 orang	264.500.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	Kabupaten Blitar	11.700 Miliar	430.636.500	APBD		13.700 Miliar	806.557.135

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	Kabupaten Blitar	1700 perusahaan	430.636.500	APBD		1800 perusahaan	806.557.135
2.18.05.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	6 kegiatan usaha	9.345.000	APBD		6 kegiatan usaha	198.207.135
2.18.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Blitar	255 pelaku usaha	350.396.500	APBD		255 pelaku usaha	423.200.000
2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kabupaten Blitar	25 kegiatan usaha	70.895.000	APBD		25 kegiatan usaha	185.150.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang tersedia tepat waktu	DPMPTSP	100%	228.422.400	APBD		100%	191.398.647

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	DPMPTSP	2 laporan	228.422.400	APBD		2 laporan	191.398.647
2.18.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	4 dokumen	228.422.400	APBD	Prioritas Pembangunan RKPD 2023 (Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan)	4 dokumen	191.398.647

BAB IV P E N U T U P

Keberhasilan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai pihak. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja PD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2023 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan cakupan layanan dan kualitas pelayanan pada masyarakat Kabupaten Blitar dengan strategi memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dan berizin di Kabupaten Blitar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2023 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710818 199101 1 002